

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan isu global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis pangan dan energi dunia, harga pangan serta energi meningkat (Ditjennakkeswan, 2011). Selanjutnya dikatakan bahwa dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sub sektor peternakan memiliki peran cukup strategis utamanya dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan di perdesaan. Namun besarnya peran tersebut, ternyata belum dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan utamanya masyarakat peternak sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang yang secara tidak langsung akan berimbas pada tingkat konsumsi masyarakat, terutama akan kebutuhan protein hewani daging sapi. Salah satu cara untuk menjamin peningkatan kebutuhan tersebut adalah dengan program swasembada daging. Kegiatan dalam pencapaian program swasembada daging sapi antara lain adalah peningkatan produksi ternak. Kementerian Pertanian (2011) menyebutkan bahwa swasembada daging sebagai program pemerintah merupakan kemampuan pemerintah sebagai regulator menyediakan 90% dari total kebutuhan daging sapi lokal di dalam negeri sedangkan 10% dipenuhi dari daging impor.

Program swasembada daging sapi sudah dijalankan pemerintah lebih dari 10 tahun lalu. Tetapi sampai saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor sapi, terutama dari Australia dan Selandia Baru. Bukti kegagalan program swasembada daging sapi ini adalah merosotnya populasi sapi di dalam negeri. Hasil sensus menunjukkan populasi sapi turun sebanyak 2,5 juta ekor, dari 10 juta ekor pada tahun 2012 menjadi 12,5 juta ekor di tahun 2013.

Beberapa upaya percepatan swasembada sapi telah banyak dilakukan diantaranya penyediaan bibit sapi lokal melalui penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan serta pengembanan usaha pembibitan sapi potong melalui VBC (*Village Breeding Center*) (Ditjennak, 2010). *Village Breeding Center* yang selanjutnya disingkat VBC adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2025 menyebutkan bahwa Zona pengembangan kawasan peternakan sapi potong terletak di Kecamatan Jonggol. Kecamatan Jonggol bukan merupakan daerah sentra produksi sapi potong di Jawa Barat, tetapi merupakan wilayah pengembangan ternak sapi potong dalam peningkatan daya saing dan sentra komoditas unggulan. Kecamatan Jonggol memiliki populasi sapi potong terbanyak di Kabupaten Bogor. Jumlah sapi potong di Kecamatan Jonggol 2013 adalah 1032 ekor.

Pemeliharaan ternak sapi potong di kecamatan Jonggol merupakan salah satu jenis usaha rumah tangga petani peternak di perdesaan yang masih dilakukan secara sampingan. Guna mengembangkan usaha budidaya tersebut, maka diperlukan kemauan dan kemampuan permodalan yang tidak sedikit. Selama ini, pemeliharaan sapi potong belum efisien dan kurang efektif, dimana kepemilikan satuan ternak yang masih berkisar antara 1-2 ekor per RTP. Oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi potong secara berkelanjutan, antara lain adalah : 1) Pengembangan kawasan sapi potong pada tahun 2010, 2011 dan 2012, dengan menyediakan bibit sapi potong, pakan dan obat-obatan dan 2) bantuan sosial penguatan sapi/kerbau betina bunting tahun 2013. Target dari program ini adalah tingkat kelahiran 70% dari populasi ternak yang ada di kelompok serta menunda penjualan induk anak sapi sebelum anak berumur 1 tahun.

Dalam mewujudkan dan mendukung program pemerintah tersebut dibutuhkan dukungan dari penyuluh. Melalui penyuluhan pertanian diharapkan dapat mengembangkan lembaga sosial petani seperti kelompok tani, agar kelompok tersebut dijadikan basis penyuluhan. Lembaga petani yang kuat akan mampu

memberikan kemudahan akses kepada anggotanya untuk berbagi informasi dalam pengembangan usaha ternak sapi potongnya dan berhubungan dengan lembaga lain.

Program penyuluhan untuk peternak sapi potong yang sudah dilakukan oleh penyuluh dalam mendukung program pemerintah tersebut dengan melakukan pembenahan kelompok sekaligus penyempurnaan pembinaan dan pendampingan petani peternak. dalam penyempurnaan dan pendampingan lebih difokuskan dalam pemberian materi dasar pemeliharaan ternak tentang pakan, kandang dan tentang kesehatan ternak serta reproduksi. Pembinaan rutin oleh penyuluh dilakukan setiap minggu di saung kelompok ataupun di kandang. Setiap penyuluh mempunyai 2-3 kelompok binaan dengan wilayah binaan 1-2 desa.

Dayat (2012) mengatakan bahwa kondisi penyuluhan pertanian di kabupaten Bogor berada pada posisi cukup berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari dukungan sarana dan prasarana dan pembiayaan yang belum mencukupi serta materi penyuluhan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan petani. Selain itu kualitas, kuantitas dan kompetensi penyuluh pertanian yang masih belum memadai serta luasnya wilayah kerja binaan yang tidak ideal merupakan faktor penting yang menghambat penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Agar tujuan program penyuluhan berjalan dengan baik perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penyuluhan terhadap peternak sapi potong di kecamatan Jonggol maka dilakukan penelitian dengan judul **“Studi Tentang Pengelolaan Penyuluhan Peternakan di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor”**

B. Rumusan Masalah

Swasembada daging sapi merupakan kemampuan pemerintah sebagai regulator menyediakan 90% dari total kebutuhan daging sapi lokal di dalam negeri sedangkan 10% sisanya berasal dari pasokan luar negeri berupa impor bakalan dan impor daging. Pelaku utama yang melaksanakan sebenarnya bukanlah pemerintah, tetapi pelaku usaha peternakan sapi berskala kecil dan menengah serta pelaku usaha peternakan sapi berskala besar. Diprioritaskan bagi pelaku usaha peternakan berskala kecil (jumlah kepemilikannya sedikit tetapi dilakukan oleh banyak peternak) dengan tetap memperhatikan fungsi fasilitator dan regulator yang kondusif bagi pelaku

usaha peternakan berskala besar (jumlah kepemilikan banyak tetapi pelakunya sedikit) (Kementerian Pertanian, 2011).

Untuk mendukung pencapaian swasembada dalam menghadapi dampak perubahan iklim global, maka perlu diciptakan sistem penyuluhan pertanian yang produktif, efisien dan efektif melalui pemantapan penyuluhan pertanian. Namun demikian, pemantapan penyuluhan pertanian guna pencapaian swasembada masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu : a) lemahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota, b) lemahnya kapasitas kelembagaan petani, c) belum optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian, d) belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian e) belum optimalnya dukungan sarana prasarana dan pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian (Rusmono, 2011).

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) kecamatan Jonggol
2. Bagaimana perilaku peternak sapi potong dalam hal usaha sapi potong
3. Berapa peningkatan produksi dan pendapatan peternak sapi potong di kecamatan Jonggol.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas yang merupakan masalah yang akan diteliti. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengelolaan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) kecamatan Jonggol.
2. Mengetahui perilaku peternak sapi potong dalam usaha sapi potong
3. Mengetahui peningkatan produksi dan pendapatan peternak sapi potong di kecamatan Jonggol

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini akan berguna dan bermanfaat untuk:

1. Secara akademik untuk menambah referensi tentang pengelolaan penyuluhan program peternakan khususnya sapi potong.
2. Secara Praktis sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait mengenai pengelolaan penyuluhan di kecamatan Jonggol khususnya dan Indonesia pada umumnya.



